

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU

Victor Pattiasina

Samie Lambert Jacobs

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Rutu Nusa – Ambon
Jln. Dr Kayadoe No 80-82 Ambon Indonesia 97117

Abstract

This Study aim to analyze inspection contribution quality of and fishery certification to Original Earnings of Area Town Maluku. Result of calculation, shown that regression coefferisien inspection retribution quality of and certification result of fishery to original earnings area in Town Maluku equal to its 0,806 meaning if inspection retribution quality of and certification result of fishery increase/mounting equal to 1% hence growth fishery retribution will mount equal to 80,6 %. This study use obtained second data from Statistical Bureau Center Town Maluku. Data hereinafter analysis by using quantitative Analysis by using regression method and also verification examination of proven hypothesis that there are influence inspection retribution quality of and certification result of fishery to growth original earnings are.

Keyword: *Kontribusi, Retribusi, Sertifikasi*

Salah satu prasyarat dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah, adalah diperlukannya kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Demikian pula halnya dengan sistem pemerintahan daerah yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi, dipersyaratkan adanya kewenangan keuangan yang dicerminkan dalam bentuk Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari 1) hasil Pajak Daerah; 2) hasil Retribusi Daerah; 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu,

dipersyaratkan pula adanya dukungan sumber keuangan yang berasal dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan pula dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (**UU No.33 , 2004**)

Dalam konteks perubahan paradigma yang disemangati oleh dasar pemikiran di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Daerah.

Dalam hal ini, termasuk pula di dalamnya adalah penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pada Dinas Perikanan Perikanan Propinsi Maluku yang merupakan salah satu unit pengelola penerimaan daerah. Terkait dengan upaya peningkatan penerimaan asli daerah yang merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemandirian daerah dalam konsep tatanan ekonomi daerah, maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan agar ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat perlu dikurangi. Dalam kerangka pikir demikian, maka peranan aparatur yang potensial khususnya dapat memberikan pelayanan yang baik akan turut berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan secara tidak langsung. Pada sisi lain dengan mencermati sumber potensi penerimaan terbatas, maka sejak dini perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat menambah sumber penerimaan daerah. Artinya berbagai peraturan daerah perlu disiapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah

yang tidak bertentangan dengan reformasi sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah disebutkan bahwa yang termasuk dalam jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengembangan sub sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah Propinsi Maluku mengingat kondisi geografis yang merupakan wilayah kelautan dengan luas laut $\pm 90\%$ dari keseluruhan wilayah. Propinsi Maluku memiliki potensi perikanan berkisar 2,7 juta ton/tahun, yang terdiri dari kelompok ikan peligas, demersal dan biota laut lainnya, dimana dari jumlah tersebut besarnya Maksimum Sustainable Yield (MSY), sekitar 1,35 juta ton/tahun, dan yang baru dimanfaatkan sekitar 24,5%.

Melihat potensi tingkat pemanfaatan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan perikanan di Maluku masih rendah dengan demikian diperlukan intensifikasi pengelolaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.

Sumber pendapatan yang berasal dari sub sektor perikanan, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Usaha perikanan penangkapan yang meliputi penangkapan ikan, binatang laut dan tumbuh-tumbuhan.
2. Usaha Perikanan budidaya berupa ikan, binatang air, dan tumbuh-tumbuhan air.
3. Pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan ekonomi di sub sektor perikanan.

Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah adalah retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan. Pemungutan retribusi ini didasarkan pada peraturan daerah nomor 15 tahun 2004, tentang retribusi pemeriksaan mutu, dan sertifikasi hasil perikanan (PERDA No.11, 2004).

Objek dari pada retribusi ini adalah semua hasil perikanan yang diperdagangkan baik antar pulau maupun ekspor. Dengan demikian pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan dimaksud untuk meningkatkan mutu hasil perikanan di Maluku, sehingga dapat bersaing dengan hasil perikanan dari daerah lainnya, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. Perkembangan penerimaan asli daerah selama periode 2001 - 2005 hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 50,29% per tahun. Kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD tersebut berasal dari Pajak daerah rata-rata sebesar 45,5%, kemudian retribusi daerah rata-rata sebesar 41,5%.

Tabel 1.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Propinsi Maluku
Tahun 2001 - 2005

		Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah		
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jenis-Jenis PAD yang Lain
2001	1.734.377.280,00	563.559.259,66	580.587.110,00	590.230.879,00
2002	5.506.062.388,00	2.157.848.507,00	1.172.392.985,00	2.175.820.896,00
2003	8.178.219.604,00	2.953.586.769,00	3.818.045.925,00	1.406.586.910,00
2004	10.816.787.790,0	4.924.454.742,00	4.136.654.595,00	1.755.678.460,50
2005	0	4.974.938.568,00	5.727.387.817,00	2.555.389.813,71
	13.257.716.200,0			
	0			

Sumber : Kantor Pemerintah Propinsi Maluku, Bagian Keuangan, Laporan Perhitung

APBD Tahun 2005

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa, tahun 2001 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.734.377.248,00, dimana sektor yang menyumbang paling besar yaitu jenis-jenis PAD yang lain sebesar 34,03%, diikuti Retribusi Daerah dan Pajak Daerah masing-masing sebesar 33,47% dan 32,49%. Pada Tahun 2002 dari jumlah PAD sebesar Rp. 5.506.062.388,00, sektor yang menyumbang terbesar yaitu Jenis-jenis PAD yang lain sebesar 39,51%, kemudian Pajak Daerah sebesar 39,19% dan Retribusi Daerah 21,29%. Pada Tahun 2003 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 8.178.219.604,00, sektor yang menyumbang terbesar yaitu Retribusi Daerah sebesar 46,68% diikuti Pajak Daerah sebesar 36,11% dan Jenis-jenis PAD yang lain sebesar 17,19%. Kemudian pada Tahun 2004 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.10.816.787.790,00, dimana sector yang menyumbang terbesar adalah sektor Pajak Daerah sebesar 45,52% diikuti Retribusi Daerah sebesar 38,24% dan Jenis- jenis PAD yang lain sebesar 16,23% Dan pada Tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.178.219.604,00, dengan sektor yang menyumbang terbesar yaitu Retribusi Daerah sebesar 43,20% diikuti Pajak Daerah sebesar 37,53% dan Jenis - jenis PAD yang lain sebesar 19,27%

Berdasarkan data dan uraian di atas selama lima tahun terakhir PAD Propinsi Propinsi Maluku selalu menunjukkan kenaikan yang cukup baik, dengan sumbangan berbagai sektor yang berfluktuasi. Penerimaan PAD ini dirasakan masih rendah untuk pembiayaan pembangunan daerah, oleh karenanya PAD harus digali dari berbagai sumber dan dikelola secara efisien.

Sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan pada asas dekosentrasi harus disertai dengan pembiayaan.

Pemerintah Daerah Propinsi Maluku setelah dilanda krisis kemanusiaan yang berkepanjangan sehingga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian serta sangat mempengaruhi bagi Pendapatan Asli daerah. Hal ini juga turut mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa kurun waktu mendatang. Hal ini mendorong untuk perlu dilakukan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian serta pengelolaan Anggaran daerah secara efisien dan efektif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Sasaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka terdapat sejumlah subjek dan objek pajak yang dipungut, terjadi pengurangan objek pajak dan retribusi daerah. Salah satu pengamatan penulis.

Sehubungan dengan itu, maka dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang menitikberatkan pada desentralisasi kekuasaan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan daerah diantaranya mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Maluku merupakan salah satu ujung tombak dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan menggali sumber-sumber keuangan lainnya dalam upaya meningkatkan realisasi pencapaian target penerimaan Dinas Perikanan Propinsi Maluku.

Oleh karena itu yang menjadi problem bagi Dinas Perikanan dan kelautan Propinsi Maluku dari waktu ke waktu adalah masalah Retribusi Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan, yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2004, tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi hasil perikanan yang mengatakan

bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah Propinsi Maluku, Retribusi Pemeriksaan Mutu Dan Sertifikasi Hasil Perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi daerah Propinsi Maluku, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari perkembangan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 terindikasi secara umum perkembangannya meningkat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Mutu
dan Sertifikasi Hasil Perikanan di Propinsi Maluku
Tahun 2001 - 2005

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Prosentase Perkembangan
2001	800.000.000,-	506.025.871,-	63,5
2002	1.000.000.000,-	814.232.165,-	81,42
2003	1.500.000.000,-	1.264.289.299,-	84,29
2004	2.000.000.000,-	1.877.670.241,-	93,88
2005	4.000.000.000,-	787.920.150,-	94,69

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku, 2005

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2001 dari target penerimaan retribusi pemeriksaan mutu hasil perikanan daerah sebesar : Rp. 800.000.000 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 506.025.871 atau sebesar 63,5 %. Pada tahun 2002 dari target penerimaan retribusi sertifikasi hasil perikanan sebesar : Rp. 1.000.000.000 ternyata yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 814.232.165 atau terealisasi sebesar : Rp. 81,42 % . Pada tahun 2003 dari target penerimaan sebesar : Rp. 1.500.000.000 hal tersebut ternyata terealisasi melampaui target yaitu sebesar : Rp.

1.264.289.299 atau terealisasi sebesar : 84,29 %. Pada Tahun 2004 dari target penerimaan sebesar Rp. 2.000.000.000 yang terealisasi sebesar : Rp. 1.877.670.241 atau terealisasi sebesar 93,88 % Pada tahun 2005 dari target penerimaan sebesar Rp. 4.000.000.000 ternyata yang terealisasi yaitu sebesar : Rp. 3.787.920.150 atau terealisasi sebesar 94,69%.

Dari data dan uraian diatas, penerimaan Retribusi Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan Daerah Propinsi Maluku selama lima tahun terakhir menunjukkan tendensi peningkatan yang ditandai dengan sumbangan berbagai sector retribusi yang juga meningkat, salah satunya adalah Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Mutu Sertifikasi Hasil Perikanan di Propinsi Maluku.

Agar lebih jelas menyangkut dengan perkembangan realisasi Ekspor Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku selama lima tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3.
Realisasi Hasil Ekspor Perikanan Propinsi Maluku
Tahun 2001-2005

Tahun	Volume (ton)	Nilai (Rp)
2001	111.532,73	63.241,18
2002	124.535,09	266.389,03
2003	146.617,85	46.431,82
2004	286.063,47	55.773,44
2005	316.531,83	46.249,85

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku, Tahun 2005

Sesuai dengan tabel 1.3. di atas dapat kita lihat mengalami peningkatan dalam realisasi hasil ekspor Perikanan di Propinsi Maluku, dimana pada tahun 2001 hasil penerimaan sebesar 111.332,73, dengan nilai

jual sebesar 63.241,18 atau sebesar -5,26 %. Kemudian pada tahun 2002 hasil penerimaan ekspor perikanan Propinsi Maluku sebesar : Rp. 124.535,09 dengan nilai jual meningkat sebesar : Rp. 66.389,03. Sedangkan pada tahun 2003 dari Realisasi Penerimaan Ekspor perikanan Propinsi Maluku sebesar Rp. 146.617,85 dengan jumlah nilai hanya sebesar Rp. 46.431,82. Pada Tahun 2004 realisasi ekspor perikanan kembali menunjukkan kenaikan sebesar 286.063,47 dengan tingkat nilai naik sebesar 55.773,44. dan pada tahun 2005 realisasi ekspor dan nilai meningkat sebesar Rp.316.531,83 dengan tingkat nilai sebesar 46.249,85.

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dimana penerimaan realisasi ekspor perikanan dan nilai ekspor perikanan selama lima tahun terakhir menunjukkan keadaan yang berfluktuasi dan dirasakan masih sangat rendah karena adanya beberapa komoditi perikanan yang mengalami penurunan harga di pasar internasional, seperti ikan campur danm ikan puri beku. oleh karenanya perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan ekspor perikanan di Propinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Agar pemerintah dapat berupaya dalam meningkatkan retribusi daerah. 2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas yaitu retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan (X) serta variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Untuk membatasi pengertian dari variabel-variabel penelitian ini, dalam tulisan ini dikemukakan defenisi operasional mengenai retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan, dan Pendapatan asli daerah. Yang dimaksud dengan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil

perikanan adalah setiap orang atau badan hukum yang hendak melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Propinsi Maluku, sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan dalam penelitian ini adalah disposable income yang merupakan pendapatan yang benar-benar diterima dan siap dibelanjakan sesuai dengan keinginan mereka (rumah tangga) atau tabungan dan pendapatan tersebut adalah pendapatan absolute (Irawan dan Suparmoko, 2000).

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan bersifat kuantitatif. Dikatakan data primer karena data diperoleh langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku, serta data sekunder karena data diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Propinsi Maluku serta pihak-pihak yang terkait dengan proses penulisan ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara langsung dengan instansi yang terkait dengan penelitian ini, oleh karena penelitian yang dilakukan bersifat observasi atau pengamatan. Agar instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dapat difungsikan dengan baik maka instrumen tersebut harus valid dan reliabel. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat mengukur variabel-variabel dengan hasil yang mantap (Gay, 1981) juga menyatakan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan secara tepat.

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linier sederhana (Gujarati, 2003) yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antara Variabel X (Retribusi Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) maka perlu dicari nilai β_1 dan β_2 sebagai parameter untuk mendapatkan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_{ij}$

persamaan tersebut diturunkan menjadi persamaan $E dx / dy$ dalam mengembangkan besarnya variabel X terhadap variabel Y.

HASIL

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, laba BUMN, penerimaan lain-lain yang sah. Dalam kaitan dengan objek penelitian yang diangkat dimana retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan turut mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dan guna mengetahui lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Sumbangan Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Di Propinsi Maluku

Tahun	Retribusi pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2001	506.025.871	580.587.110,00	-
2002	814.232.165	1.172.392.985.00	50,47
2003	1.264.289.299	3.818.045.925.00	69,29
2004	1.877.670.241	4.136.654.595,00	70,7
2005	787.920.150	5.727.387.817,00	27,77

Sumber : Dinas Pendapatan Propinsi Maluku Laporan Tahunan 2005 (data diolah)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumbangan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan asli daerah ternyata dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan kecendrungan menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2001, jumlah penerimaan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan sebanyak 506.025.871 rupiah sedangkan pendapatan asli daerah sebanyak 580.587.110 rupiah, kemudian pada tahun 2002

penerimaan retribusi pemeriksaan mutu hasil perikanan sebanyak 814.232.166 rupiah sedangkan Pendapatan asli daerah sebanyak 1.172.392.985 rupiah dengan tingkat sumbangan sebesar 50,47 persen. Pada tahun 2003 retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan dalam memberikan sumbangannya terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan mengalami penurunan sebanyak 787.920.150 rupiah sedangkan pendapatan asli daerah sebanyak 5.727.387.817 rupiah atau hanya memberikan sumbangan sebesar 27,77 persen.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Dari rumusan di atas dapat diformulakan variabelnya diketahui dengan analisis regresi sederhana sesuai dengan hasil perhitungan (lihat lampiran 1) sebagai berikut : $Y = 69.263,33 + 1,116X_1$; $Se = 0,127$; $t_h = 3,293$; $r = 0,465$; dan $r^2 = 0,80$

Dari persamaan di atas terlihat bahwa, hasil perhitungan atau pengolahan data diperoleh $\beta_{\Sigma x} = 1,116$ artinya jika retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan meningkat sebesar satu persen maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 69.263.33 persen, selanjutnya untuk mengetahui berapa besarnya relatif antara penerimaan Retribusi Pemeriksaan Mutu dan sertifikasi Hasil perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diamati dari besarnya nilai r (korelasi) yaitu sebesar 0,465 atau 46,05%

Sedangkan untuk melihat berapa besar pengaruh retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan

asli daerah, dapat dilihat dari besarnya nilai r^2 yaitu sebesar 0,80,6 atau 80,6%, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh besarnya retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh besarnya retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya sebesar 14,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diidentifikasi dari pos-pos pendapatan asli daerah yang lain.

Dalam bagian ini akan diuji kebenaran hipotesis, yang menganggap tidak adanya penyimpangan asumsi klasik dalam perhitungan regresi (model yang digunakan). Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas (Y) secara parsial terhadap variabel terikat (X), dimana dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : b_i = b$$

$$H_a : b_i \neq b$$

Dimana :

1. Apabila $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ maka terima H_0 dan tolak H_a atau dengan pengertian bahwa variabel X (Retribusi Pemeriksaan Mutu dan sertifikasil Hasil Perikanan) t tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (variabel Y).
2. Apabila $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ maka menolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a) atau dengan pengertian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (Retribusi pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah).

Hasil perhitungan t_{hitung}

Sesuai hasil perhitungan lihat lampiran 1, diperoleh t hitung

Tabel.4.2
Hasil perhitungan uji "t"
Untuk t 0,05 (95%)

	Nilai "t"	
	T hitung	T tabel
Y	3,293	2,665

Dari hasil perhitungan uji "t" terbukti bahwa pengujian Hipotesa teruji, dimana nilai-nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} hal ini berarti secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel terikat dalam hal ini retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Propinsi Maluku . Atau dengan kata lain kita menerima hipotesa penulisan ini atau terbukti ada pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel terikat . ini berarti bahwa semakin baik retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku.

KESIMPULAN

Bertolak dari hasil analisa dan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peranan peningkatan retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa koefesien regresi hubungan antara retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku adalah sebesar 0,806 artinya apabila retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan bertambah/meningkat sebesar 1

persen, maka pertumbuhan retribusi perikanan akan meningkat sebesar 80,6 persen.

2. Berdasarkan analisa kuantitatif dengan menggunakan metode regresi serta pembuktian pengujian hipotesis terbukti bahwa terdapat pengaruh antara retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
3. Semakin meningkatnya retribusi pemeriksaan mutu dan sertifikasi hasil perikanan ini berarti terjadi pula kenaikan pada pertumbuhan pendapatan asli daerah dan sektor perikanan di Propinsi Maluku.

LAMPIRAN 1

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X _a	,	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,465	,806	-,045	548460.53

a Predictors: (Constant), X

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	4785618,959	1	4785618,959	,281	,633
	Residual	51131731,041	3	17043910,347		
	Total	55917350,000	4			

a Predictors: (Constant), X

b Dependent Variable: Y

Coefficients

		Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients ts	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	69.263,33	4.888,260		5,848	,232
	X	1,116	,0127	3,293	,909	,430

a Dependent Variable: Y

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc. Graw - Hill International Edition
- Irawan dan Soeparmoko. 2000. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keempat, Yogyakarta : Penerbit BPFE UGM.
- Soeparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sukirno. 2002. *Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Soedargo, R. 1996. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Penerbit Gramedia.